

Nama: Rizka Mufidah

NPM: 2313031001

Kelas A

Pandangan dan Argumentasi atas Dua Jurnal Aktiva Tetap

Pengantar

Dua artikel yang dibahas sama-sama mengangkat persoalan aktiva tetap, namun dari sudut pandang yang berbeda. Artikel pertama karya Meity Handayani (2013) berfokus pada evaluasi pelaporan aktiva tetap di lingkungan pemerintahan, sedangkan artikel kedua oleh Budiman, Pangemanan, dan Tangkuman (2014) menganalisis perlakuan akuntansi aktiva tetap pada perusahaan pembiayaan swasta, yaitu PT. Hasjrat Multifinance Manado. Keduanya relevan untuk dikaji bersama karena mencerminkan bagaimana pengelolaan aktiva tetap masih menjadi persoalan mendasar, baik di sektor publik maupun swasta.

Artikel 1

Evaluasi Penyajian Pelaporan Aktiva Tetap untuk Meningkatkan Pengawasan Kelembagaan Pemerintah (Meity Handayani, 2013)

Isi dan Temuan

Artikel ini berangkat dari fakta bahwa sebagian besar temuan ketidakwajaran laporan keuangan pemerintah bersumber dari pelaporan aktiva tetap. Penulis menggunakan lima kriteria audit aktiva tetap sebagai kerangka analisis, yakni *existency/validity*, *completeness*, *valuation*, *right & obligation*, serta *classification & disclosure*. Dari kelima kriteria tersebut, ditemukan bahwa pemerintah umumnya sudah memenuhi tiga kriteria pertama, namun masih bermasalah pada aspek *valuation* dan *disclosure*.

Permasalahan paling mendasar yang diangkat adalah sistem SIMAK yang digunakan pemerintah belum mampu mengakomodir kebutuhan pemeriksa, terutama karena tidak mencantumkan informasi penyusutan secara lengkap. Perhitungan penyusutan selama ini masih sepenuhnya mengandalkan DJKN (Ditjen Kekayaan Negara), bukan dilakukan sendiri oleh masing-masing instansi. Selain itu, transisi dari akuntansi berbasis kas ke akrual sesuai PP No. 71 Tahun 2010 belum berjalan optimal karena minimnya pengetahuan aparat tentang akuntansi akrual.

Argumentasi dan Elaborasi

Persoalan penyusutan yang diangkat artikel ini sangat fundamental. Dalam kerangka teori akuntansi, penyusutan bukan sekadar pencatatan penurunan nilai, melainkan representasi dari konsumsi manfaat ekonomi suatu aset selama masa pakainya. Tanpa pengungkapan penyusutan yang memadai, laporan keuangan pemerintah tidak dapat mencerminkan kondisi aset yang sesungguhnya, dan lebih jauh lagi tidak bisa menjadi dasar pengambilan keputusan yang andal.

Ini sejalan dengan tujuan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) yang secara eksplisit menekankan akuntabilitas, transparansi, dan manajemen aset yang efektif. Jika instansi pemerintah tidak mampu menghitung sendiri depresiasi asetnya, maka fungsi manajerial laporan keuangan menjadi sangat terbatas. Padahal, informasi nilai buku aktiva setelah penyusutan sangat penting untuk menentukan kapan suatu aset perlu dihapus, diperbarui, atau diganti, yang kesemuanya berimplikasi langsung pada perencanaan anggaran.

Masalah gudang penyimpanan yang tidak memadai yang turut disinggung penulis juga mencerminkan lemahnya pengendalian internal atas aset fisik. Dalam literatur audit, pengendalian fisik atas aset tetap merupakan bagian dari komponen pengendalian intern yang tidak bisa diabaikan, karena aset yang rusak atau hilang tanpa tercatat akan menyebabkan nilai aktiva dalam laporan keuangan menjadi overstated.

Satu hal yang perlu dikritisi dari artikel ini adalah minimnya data empiris yang disajikan secara kuantitatif. Penelitian hanya berbasis telaah dokumen dan observasi tanpa kasus nyata yang cukup spesifik, sehingga sulit menilai seberapa luas dan dalam permasalahan yang ada. Artikel ini lebih berfungsi sebagai analisis normatif daripada deskriptif empiris.

Artikel 2

Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap pada PT. Hasjrat Multifinance Manado 2012 (Budiman, Pangemanan & Tangkuman, 2014)

Isi dan Temuan

Artikel ini meneliti apakah perlakuan akuntansi aktiva tetap pada PT. Hasjrat Multifinance sudah sesuai dengan SAK, khususnya PSAK No. 16 tentang aktiva tetap dan PSAK No. 48 tentang penurunan nilai aset. Dari enam sampel transaksi yang dianalisis, ditemukan setidaknya tiga penyimpangan utama.

Pertama, terdapat ketidakseragaman dalam menentukan harga perolehan. Kasus pembelian mesin fotocopy menunjukkan bahwa biaya pengiriman sebesar Rp240.750 tidak dimasukkan ke dalam harga perolehan, melainkan dibebankan sebagai biaya operasional. Ini jelas bertentangan dengan PSAK No. 16 yang menyatakan bahwa harga perolehan mencakup seluruh pengeluaran yang diperlukan hingga aset siap digunakan.

Kedua, perusahaan tidak pernah melakukan pengujian penurunan nilai aset (impairment test), padahal PSAK No. 48 mewajibkan hal ini dilakukan secara berkala, terutama bila ada indikasi penurunan nilai.

Ketiga, aset tetap yang masa ekonomisnya sudah habis dari tahun 2005 masih tetap tercatat dalam daftar aktiva tetap hingga 2012 tanpa pernah dilakukan penghentian pengakuan. Ini menyebabkan nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi nyata.

Argumentasi dan Elaborasi

Kasus PT. Hasjrat Multifinance mencerminkan persoalan yang cukup umum di perusahaan skala menengah, yaitu lemahnya konsistensi dalam penerapan standar akuntansi. Ketidakseragaman penetapan harga perolehan bukan hanya masalah teknis pencatatan, tapi berimplikasi pada keandalan angka aktiva tetap di neraca dan besarnya beban penyusutan yang diakui setiap periode. Jika harga perolehan tercatat lebih rendah dari yang seharusnya, maka beban penyusutan akan understated dan laba perusahaan akan overstated, meski dalam jumlah kecil.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah absennya impairment test dan penghentian aset. Dalam konteks teori going concern, perusahaan perlu memastikan bahwa aset yang dilaporkan benar-benar memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Mencantumkan aset yang sudah tidak berfungsi dalam laporan keuangan bukan hanya melanggar standar, tetapi juga menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam menilai kemampuan operasional perusahaan.

Satu aspek yang menarik dari artikel ini adalah bagaimana metode garis lurus digunakan secara seragam untuk semua jenis aset dengan tarif 12,5%, tanpa mempertimbangkan apakah metode tersebut paling mencerminkan pola konsumsi manfaat aset tersebut. Dalam beberapa kasus, aset teknologi seperti komputer dan kamera digital mengalami penurunan nilai yang jauh lebih cepat dari jadwal penyusutan garis lurus, sehingga metode saldo menurun atau jumlah angka tahun secara teoritis lebih tepat digunakan.

Perbandingan dan Sintesis

Jika kedua artikel dibandingkan, ada benang merah yang jelas: baik di sektor pemerintah maupun swasta, aspek penyusutan dan pengungkapan aktiva tetap masih menjadi titik lemah yang berulang. Di pemerintahan, masalahnya lebih pada ketergantungan sistem dan belum siapnya SDM dalam transisi ke akuntansi akrual. Di sektor swasta, masalahnya lebih bersifat operasional, yakni tidak konsistennya penerapan standar yang sebenarnya sudah tersedia dan dipahami secara umum.

Kedua artikel juga sama-sama merekomendasikan perlunya pengendalian internal yang lebih kuat, baik dalam bentuk sistem yang lebih terintegrasi maupun pemeriksaan fisik aset secara berkala. Hal ini konsisten dengan pandangan bahwa pengendalian internal yang memadai merupakan prasyarat bagi kualitas pelaporan keuangan yang dapat dipercaya.

Dari sisi metodologi, artikel Budiman dkk. lebih kuat secara empiris karena menyertakan data aktual transaksi dan perbandingan jurnal, sedangkan artikel Handayani lebih bersifat normatif dan konseptual. Keduanya saling melengkapi untuk memahami persoalan aktiva tetap dari dua konteks yang berbeda namun memiliki akar masalah yang serupa.

Penutup

Secara keseluruhan, kedua artikel ini memberikan gambaran nyata bahwa pengelolaan dan pelaporan aktiva tetap masih memerlukan perhatian serius, terlepas dari jenis entitasnya. Bagi mahasiswa akuntansi, membaca keduanya secara bersamaan memberi pemahaman yang lebih utuh bahwa standar akuntansi bukan sekadar aturan teknis, melainkan alat untuk memastikan laporan keuangan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya.